

**EFEKTIFITAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KECAMATAN TALLO KOTAMADYA DATI II
UJUNG PANDANG
(SUATU STUDI KASUS)**



OLEH
BOSOWA
M U L Y A D I
Stb/Nirm ; 4592021062/992110051044

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh gelar
Sarjana Lengkap dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1996

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari Sabtu, Tanggal 7 Juni 1996.

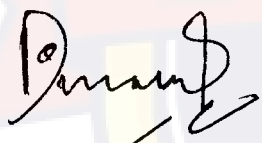
Skrripsi dengan judul : " EFEKTIFITAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN TALLO KOTAMADYA DATI II UJUNG
PANDANG (SUATU STUDI KASUS) " .

Nama : Mulyadi
Nomor Stb/Nim : 45 92 021 062 / 992110051044
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara.

Disetujui untuk diujikan pada tanggal, 7 Juni 1996.

Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Suparman Mekka

Pembimbing II



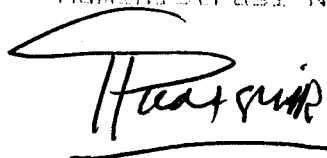
Drs. Natsir Tompo

Mengetahui,



Drs. Guntur Karnaeni

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 1998.

Nama : M u l y a d i

Nomor Stb/Nim : 45.92.021.062 / 992110051044

J u r u s a n : Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Administrasi Negara program Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM

DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA.

Rektor Universitas "45"

PROF. DR. H. MAPPA NASRUM, MA.

Dekan Fisip UNHAS

PANITIA UMUM

Drs. GUNTUR KARNAENI

K e t u a

Drs. SUPARMAN MEKKA

Sekretaris

TIM PENGUJI,

1. Drs. H. MISBAHUDDIN ACHMAD, MS

(.....)

2. Drs. GUNTUR KARNAENI

(.....)

3. Drs. HUSAIN HAMKA, MS

(.....)

4. Drs. RIDWAN ISKANDAR

(.....)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Efektivitas	13
B. Pengertian Administrasi	14
C. Pengertian Demografi	15
D. Pencatatan Administrasi Penduduk	20
E. Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Kelurahan	25
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah Berdirinya	34
B. Keadaan Demografi Kecamatan Tallo	36

C. Sarana dan Fasilitas Kantor Kecamatan Tallo.....	39
D. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Tallo	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Sistem Registerasi Kependudukan di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang.	49
B. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Pelaksanaan Registerasi Kependudukan Kecamatan Tallo	59
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Registerasi Kependudukan di Kecamatan Tallo	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
I.	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan di Kecamatan Tallo Akhir Tahun 1995	37
II.	Klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan	43
III.	Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Golongan	44
IV.	Klasifikasi Pegawai Menurut Masa Kerjanya	45
V.	Klasifikasi Pegawai Menurut Umur/Usia ...	46
VI.	Klasifikasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	47
VII.	Tanggapan Responden Mengenai Registerasi Kelahiran di Kecamatan Tallo	54
VIII.	Tanggapan Responden Mengenai Registerasi Kematian di Kecamatan Tallo	55
IX.	Tanggapan Responden Mengenai Registerasi Migrasi (Pendatang) di Kecamatan Tallo ..	57
X.	Tanggapan Responden Mengenai Registerasi Migrasi Keluar (Pindah) di Kecamatan Tallo	60
XI.	Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kesadaran pada Penduduk terhadap Registerasi Kelahiran di Kecamatan Tallo	61
XII.	Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kesadaran pada Penduduk terhadap Registerasi Kematian di Kecamatan Tallo	62
XIII.	Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Penduduk Berimigrasi Masuk (Pendatang) Mematuhi Kewajiban Mencatatkan Diri pada Pemerintah di Kecamatan Tallo	64
XIV.	Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Penduduk Berimigrasi Keluar (Pindah) Mematuhi Kewajiban Melaporkan Diri pada Pemerintah di Kecamatan Tallo	65

XV. Tanggapan Responden dalam Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelahiran Penduduk dengan Peraturan yang Berlaku di Kecamatan Tallo 68

XVI. Tanggapan Aparat Pemerintah Melakukan Registrasi Kependudukan di Kecamatan Tallo 70

XVII. Bagaimana Fasilitas yang Digunakan untuk Menjalankan Registrasi Kependudukan di Kecamatan Tallo 71



Mulyadi Sopal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Efektifitas Registerasi Penduduk di Kotamadya Ujung Pandang (Kasus di Kecamatan Tallo), sekalipun di sana sini masih memerlukan koreksi dan perbaikan seperlunya.

Salawat dan taslim penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., serta para sahabatnya yang rela berkorban kalimat Allah di atas bumi tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan berbagai pihak yang telah penulis terima, kiranya sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda H. Andi Mahmud, Ibunda Dra. H. Muhira Rasyid, Adinda Mukti Andi Mahmud, dan Andi Mitrayani.
2. Bapak H. Andi Sose, pendiri Yayasan "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid, Ketua Harian Yayasan Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA, Rektor Universitas "45"
5. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang
6. Bapak Drs Suparman Mekka dan Drs Natsir Tompo, masing-masing sebagai pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Tallo beserta para lurah sekecamatan Tallo yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian di kantornya.
8. Bapak dosen dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
9. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu selama duduk dibangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala bantuan dan fasilitas yang diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Ujung Pandang, Juni 1996

P e n u l i s,

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Registerasi adalah merupakan cara yang paling tepat untuk mencatat semua peristiwa yang telah terjadi. Biasanya ini bersifat keharusan, sebab sistem ini tidak rumit dan sulit dibandingkan dengan sensus nasional. Hal ini dikarenakan pendaftaran dilakukan secara terus menerus atau rutinitas. Namun bila dikaji lebih jauh mengenai sistem ini dalam beberapa hal terlihat kenyataan klasifikasi mengenai karakteristik pribadi seseorang tentunya menimbulkan masalah-masalah yang besar di dalamnya.

Peristiwa ini yang terjadi diklasifikasikan dalam beraneka ragam jenis dan tepat, setiap jenis itu didefinisikan secara tepat yang akibatnya tidak mungkin terdapat satu pencatatan yang menyeluruh mengenai keadaan setiap individu dan lingkungannya yang dijadikan kerangka untuk nilai yang lain.

Sebagai konsekuensi dari itu, maka seorang petugas registerasi mempunyai tanggung jawab untuk tetap mempertahankan standar dan karakteristik yang diklasifikasikan secara seragam dan juga harus ber-

usaha sedemikian rupa agar orang sebagian besar memperoleh informasi.

Dalam bidang kependudukan, tingginya angka kematian dibandingkan dengan angka kelahiran dan adanya sebagian penduduk yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dua masalah utama yang menghambat efektifitas registrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan aparat pemerintah untuk melaksanakan tugas seefektif mungkin dan diharapkan kesadaran masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan utama dapat tercapai.

Pembangunan dalam bidang kependudukan akan berhasil bukan saja dari segi pelayanan, melainkan harus didukung oleh pengadaan prasarana dan sarana kependudukan kepada masyarakat dan dalam suatu wilayah kerja tertentu.

Dengan demikian kantor kecamatan sebagai salah satu bentuk organisasi pelayanan kependudukan terdepan kepada masyarakat ditingkat kecamatan, pada gilirannya menjadi tumpuan harapan masyarakat di daerah pedesaan untuk melayani dan mempertahankan standarisasi registrasi kependudukan secara optimal, seperti mendata angka kelahiran, angka kematian serta jumlah angka perceraian dalam suatu daerah yang memerlukan perhatian atas seluk beluk tersebut.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN RI
(Bina Pustaka Tama: 98) dijelaskan bahwa:

" Administrasi pencatatan dan statistik kependudukan terus disempurnakan, sehingga menjadi sumber data yang dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan diberbagai bidang sektor wilayah dan daerah serta menunjang perkiraan dan sasaran berskala dari perkembangan kependudukan " .

Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka jelas betapa pentingnya efektifitas registrasi kependudukan pada setiap daerah untuk melakukan registrasi penduduk, untuk melakukan registrasi dalam cakupan wilayah kerjanya masing-masing sebab dengan sistem ini registrasi tersusun dengan baik berdasarkan buku pedoman yang telah disediakan, yang nantinya berguna bagi aparat pemerintah dalam hal prioritas utama untuk masyarakat setempat, demikian pula buku registrasi penduduk sangat perlu dijaga dan dipelihara oleh elite politik setempat untuk mencatat kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan nama dan perubahan tempat tinggal.

Dalam kaitan itu maka registrasi penduduk memenuhi dua tujuan utama sebagai mana yang dikemukakan oleh Soediono MP Tjondronegoro, dkk yaitu:

" Sebagai catatan resmi dari suatu peristiwa tertentu dan sumber yang berharga bagi penyusunan statistik yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan". (1980 : 37)

Karena itu untuk menyusun program pembangunan nasional baik dalam ekonomi maupun non ekonomi diperlukan registerasi penduduk. Di negara kita ditangani oleh 4 (empat) Lembaga Pemerintah yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama. Di sini terletak kesimpang siuran menyangkut wewenang, organisasi, aparatur ditambah sikap masyarakat sehingga data yang diperoleh diragukan kecermatannya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku yang sama, digambarkan bahwa statistik penduduk dijamin apapun mencakup dua kegiatan sebagai mana dikemukakan oleh Soediono MP Tjondronegoro yaitu:

" Merupakan unsur dasar yang diikuti oleh jumlah dan kesimpulan pelaksanaannya lewat sensus, pencatatan sipil, angket dan sebagainya serta penggunaan jumlah diperoleh berupa studi dasar untuk maksud tertentu atau kebijaksanaan tertentu ". (1980 : 38)

Kedua kegiatan itu, di mana sifatnya materil dan administratif yang membutuhkan bantuan tenaga pegawai serta penerapan berbagai alat teknik, karena berhubungan dengan penduduk maka kelancaran dalam pelaksanaannya serta keterbukaannya dari peradaban bangsa yang bersangkutan merupakan wewenang dari pemerintah atau elite politik serta kerelaan masyarakat itu sendiri.

Demikian pula halnya seluruh aparat pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang khususnya aparat Wilayah Kecamatan Tallo, yang secara rutinitas dan berskala yang senantiasa menyusun registrasi penduduk di wilayah kerjanya masing-masing.

Namun dalam pelaksanaannya registrasi penduduk di wilayah kerjanya masing-masing terlihat kesimpang siuran. Belum ada sistem registrasi penduduk tersebut ditangani oleh aparat pemerintah dari instansi terkait. Juga karena pekerjaan registrasi penduduk tersebut ditangani serta kesadaran masyarakat belum tahu akan kegunaanya dan kadang petugas mengalami banyak kesulitan. Ini disebabkan oleh kurangnya sarana fasilitas yang kurang memadai dalam suatu institusi.

Dengan dasar itulah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh sekaligus melatar belakangi penulisan skripsi ini dengan judul:

"EFEKTIVITAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG (KASUS DI KECAMATAN TALLO)".

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam situasi dan kondisi sekarang ini diharapkan seluruh aparat pelayanan masyarakat utamanya di tingkat kecamatan, utamanya masalah registrasi penduduk bekerja secara efektif dan efisien dan selalu

Berpijak pada prosedur yang ada. Karena dengan prosedur yang tepat serta mudah pelaksanaannya dapat dipastikan tujuan yang berdaya guna dapat tercapai. Dan bila tujuan akhir tercapai barulah suatu usaha dapat dikatakan efektif.

Karena tulisan ini pada pokoknya berorientasi pada efektifitas registrasi penduduk, maka bidang kependudukan yang paling besar adalah kantor kecamatan untuk tingkat kecamatan dengan unit satelitnya diberikan prioritas tinggi dalam pengembangan kependudukan. Selain itu jika diketahui bahwa tercapainya registrasi kependudukan yang baik menjadi tujuan akhir pelayanan kependudukan, karena dilain pihak masih terdapat adanya kesadaran yang rendah dikalangan masyarakat sehingga penduduk yang bermukim dalam suatu wilayah tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan ada penduduk yang memiliki KTP yang ganda uorta jika ada penduduk yang lahir tidak dilaporkan, nanti ketika ada yang meninggal mengakibatkan angka kematian yang tinggi dibandingkan angka kelahiran.

Mengingat luasnya cakupan dalam penyusunan skripsi ini terdapat 4 (empat) instansi terkait yang melaksanakan registrasi penduduk yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka peneliti membatasi untuk mengambil data pada

Departemen Dalam Negeri dan membatasi diri hanya mengambil satu kecamatan di antara 11 kecamatan yang ada di Kotamadya Ujung Pandang yaitu Kecamatan Tallo.

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang ?
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo?
3. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo?
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kependudukan.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran secara kongkrit kepada Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang khususnya aparat pemerintah di Kecamatan Tallo.
- c. Merupakan salah satu syarat untuk menempuh Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

D. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

- a. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang keadaan pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo.
- b. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Studi Kasus (Case Study) yaitu dilakukan secara mendalam dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok pembahasan dan menganalisa lebih jauh terhadap masalah-masalah yang dikemukakan untuk mencari pemecahannya.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi yang diambil adalah seluruh masyarakat Kecamatan Tallo yang berjumlah 139.366 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan non random sampel dengan teknik Purposive Sampel. Dengan teknik ini peneliti menentukan 60 orang sebagai sampel yang terdiri dari 7 orang dari pimpinan yang terkait dan 27 orang yang statusnya pegawai biasa di Kantor Kecamatan Tallo, serta 26 orang mewakili dari masyarakat yang peneliti anggap memenuhi kriteria sampling.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Wawancara (Interview) kepada aparat yang mengetahui pokok permasalahannya yaitu Kepala Wilayah Kecamatan, Sekretaris Camat, Lurah serta masyarakat yang ada di Kecamatan Tallo.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Wilayah Kecamatan	=	1 orang
2. Sekretaris Kecamatan	=	1 orang
3. Kaur Pemerintahan	=	1 orang
4. Kepala Seksi	=	1 orang
5. Kepala Kelurahan	=	3 orang
6. Pegawai biasa	=	27 orang
7. Masyarakat terbagi atas:		
a. Tokoh Agama :		
- Agama Islam	=	1 orang
- Agama Kristen Katolik	=	1 orang
- Agama Kristen Protestan	=	1 orang
- Agama Hindu	=	1 orang
- Agama Budha	=	1 orang
b. Tokoh Pemuda :		
- Unsur K N P I	=	1 orang
Unsur A M P I	=	1 orang
Unsur F K P P I	=	1 orang
Unsur Group Remaja	=	1 orang
c. Masyarakat biasa sesuai dengan jenjang pendidikannya:		
- Sarjana	=	4 orang
- S M A	=	6 orang
- S M P	=	5 orang
- S D	=	2 orang
		<hr/>
Jumlah	=	60 orang

b. Angket yaitu berupa daftar pertanyaan (kuisi-
oner) kepada semua responden.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kuisi-
ner mula diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel
frekuensi agar mudah dianalisa secara deskriptif
kuantitatif atau persentase.

E. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan skripsi ini dibagi dalam
beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang memuat:
Latar Belakang Masalah, Rumusan dan
Batasan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian
dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang memuat:
Pengertian Efektifitas, Pengertian
Administrasi, Pengertian Demografi,
Masalah Pencatatan dan Pelaksanaan
Administrasi Penduduk di Kelurahan.

Bab Ketiga Gambaran Umum Lokasi Penelitian memuat:
Sejarah Berdirinya, Keadaan Demografi,
Sarana dan Fasilitas Kecamatan Tallo
dan Keadaan Pegawai di Kecamatan Tallo.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat:
Sistem Registerasi Kependudukan di
Kecamatan Tallo, Tingkat Kesadaran
Masyarakat terhadap Pelaksanaan Regis-
terasi Kependudukan di Kecamatan Tallo,
Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam
Efektifitas Registerasi Penduduk di
Kecamatan Tallo.

Bab Kelima Kesimpulan dan Saran-saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektifitas

Istilah efektifitas, berasal dari bahasa Inggris yang berarti berhasil, manjur, atau tepat mengenai sasarannya. Dan sebagai istilah umumnya orang mengambil alih istilah ini dalam aslinya "Efektif". Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Ensiklopedia Administrasi yang dinyatakan bahwa: "Efektif adalah suatu kata sifat yang berarti berlaku atau berguna. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan". (Paraita Estra, 1977 : 149)

Sedangkan dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dikemukakan oleh Al. Slamet Ryndi, SKM mengatakan bahwa kata efektifitas dirumuskan sebagai berikut: "Suatu program dilain pihak lebih banyak digunakan atau dihubungkan dengan kecepatan yang tepat mengenai sasaran dituju". (1982 : 187)

Adapun pendapat H. Emerson adalah sebagai berikut:

" Efektifitas adalah pengakuan dalam arti tercapainya atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dayaguna yang diutamakan manfaatnya dan biasa juga dirumuskan sebagai pemanfaatan untuk mencapai tujuan." (Soewarno Handayani-rat : 17)

Ukuran dari suatu bentuk hasil (Benefid) dari suatu usaha ukuran yang sering dipakai dalam bidang kesehatan adalah berkurangnya suatu rasa atau keadaan yang tidak memuaskan. (Pariata Westra, 1987 : 87)

B. Pengertian Administrasi

Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur lebih dari seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing orang. Demikian di mana-mana dari waktu ke waktu terdapat kelompok orang, tujuan tertentu, dan kerja sama.

Istilah administrasi yang dalam bahasa Inggris disebut "Administration". Perkataan administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *Ad* dan *Minisytrate*, suatu kata kerja yang berarti melatani, membantu, menunjang atau memenuhi. Dari perkataan ini terjadi kata benda "administrasi" dan kata sifat "*Administrativus*".

Pengertian Administrasi menurut Drs. The Liang Gie mengatakan bahwa:

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya pengertian Administrasi menurut DR.

Sondang P. Siagian, MPA (1985 : 5) mengatakan bahwa:

" Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya " .

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya administrasi adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan aktifitas tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau yang terdiri dari dua orang atau lebih guna memenuhi target yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan guna untuk kepentingan bersama di antara anggota.

Lebih lanjut dikemukakan pengertian administrasi dalam pembahasannya ada 4 macam guna teori administrasi yang berdasarkan pendapat Daniel E. Griffiths (1981 : 43) dalam buku bahasan berjudul Administrative Theory dijelaskan bahwa:

1. Sebagai petunjuk untuk melakukan tindakan.
2. Sebagai petunjuk untuk menghimpun fakta-fakta.
3. Sebagai petunjuk untuk menghasilkan pengetahuan baru.

C. Pengertian Demografi

Sebagaimana diketahui hasil penemuan mengenai masalah kependudukan pada hakekatnya secara relatif dapat dikatakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang baru. Kalau ditinjau lebih lanjut bukanlah merupakan

inovasi karena dalam perkembangannya sejak dahulu kala sudah banyak dilakukan berbagai eksperimen untuk menghitung jumlah penduduk. Namun patut diakui penggunaan statistik itu baru saja dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir ini.

Semua perkembangan tersebut banyak tercampur dengan kemajuan ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, bahkan juga dengan beberapa cabang ilmu pengetahuan tentang riset medis. Akibatnya tidak ada perbedaan yang tajam antara garis perbedaan kependudukan dengan ilmu pengetahuan lain yang banyak kegiatannya, demikian pula dengan seperangkat prinsip-prinsip yang sudah mantap menjadi dasar pemahaman tentang pengetahuan tersebut. Dalam mengelolah data yang sudah tersedia, analisa kependudukan biasanya menerapkan beberapa prosedur yang biasanya sudah sering digunakan. Sampai suatu tingkat tertentu prosedur standar tersebut terdiri dari berbagai teknik standar, tetapi di lain pihak tak jarang harus dipaparkan sedemikian rupa terlebih dahulu dan dapat disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini dapat diberikan suatu pandangan mengenai kependudukan dari segi demografi yang dikutip oleh George W. Barclay (1990: 2) mengatakan bahwa demografi adalah:

" Gambaran mengenai jumlah penduduk secara berurutan. Dalam hal ini jumlah penduduk dipandang sebagai kumpulan manusia dan perhitungannya disusun menurut berbagai bentuk statistik tertentu. Demografi selalu berkaitan dengan perilaku kumpulan anggregantas (bagian dari kumpulan itu), dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perilaku setiap individu ".

Dengan demikian, maka masalah yang selalu mendapat perhatian para ahli dititik beratkan pada proses penggantian sejumlah penduduk secara individual. Hal ini berarti bahwa setiap keanggotaan akan senantiasa mengalami perubahan secara konstan. Ada orang tertentu yang meninggal setiap tahun sedangkan yang lain malah dilahirkan, selain itu ada juga sekelompok penduduk yang berkurang atau bertambah karena migrasi. Faktor-faktor tersebut biasa disebut proses vital, hal ini disebabkan karena ada sarana-sarana tertentu di mana penduduk akan bertambah sehingga eksistensinya tetap ada. Pertumbuhan, pengurangan atau tetapnya jumlahnya penduduk merupakan akibat dari faktor faktor tersebut di atas. Hubungan yang sederhana ini merupakan salah satu faktor demografi yang terpenting.

Komposisi penduduk dicerminkan oleh distribusi penduduk di antara berbagai kategori standar tertentu. Sedangkan di lain pihak perubahan akan merupakan akibat dari berbagai peristiwa, yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Atas dasar argumen

inilah maka kelahiran, kematian disebut berbagai peristiwa yang "urgen" sedang migrasi, perkawinan, perceraian dan peristiwa lainnya kadang-kadang disebut juga peristiwa vital meskipun sebenarnya tidak lebih dari pemindahan penduduk dari kategori yang satu ke kategori yang lain di dalam penduduk yang sama.

Selama jumlah penduduk selalu mengalami perubahan yang konstan, komposisinya harus diperhitungkan menurut waktu tertentu. Secara ideal hal ini merupakan moment yang sama-sama dalam semua bagian penduduk. Peristiwa vital menghasilkan perubahan yang pada hakekatnya tidak pernah terjadi secara serentak, tetapi terjadi pada satu periode tertentu dan lamanya periode tersebut harus juga diperinci secara teliti.

Selain itu terdapat dua jenis data dasar yang dalam kaitannya dengan perhitungan jumlah penduduk sebagaimana diutarakan oleh George W. Barclay (1990:4) yaitu sebagai berikut:

1. Enumerasi (pencacahan) yaitu menghitung setiap orang yang dalam sesaat. Data tersebut biasanya diperoleh dari sensus. Di mana seluruh penduduk dihitung satu persatu pada suatu saat yang hampir bersamaan.
2. Bentuk statistik yang lain ialah catatan dari semua peristiwa vital, yang pada umumnya

merupakan peristiwa yang terjadi dalam satu tahun kalender. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara registrasi yang disusun untuk mencatat semua peristiwa tertentu misalnya: kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, perceraian yang sering terjadi.

Namun demikian perbedaan antara kedua bentuk statistik di atas di dasarkan atas metode yang diterapkan untuk mengumpulkan fakta. Hal ini pada hakekatnya justru terletak pada ciri fakta itu sendiri yaitu di mana yang satu merupakan catatan setiap penduduk secara individual, sedangkan yang lain mengenai catatan tentang berbagai peristiwa yang terjadi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa satu nilai perhitungan mengenai jumlah seluruh penduduk dapat diperoleh dari satu register umum, yaitu dengan cara menyusun suatu catatan mengenai setiap orang pada suatu bersamaan. Sedangkan dari hasil lain dapat diketahui jumlah semua peristiwa yang terjadi pada tahun lalu beberapa tahun sebelumnya. Walaupun demikian kedua sistem pencatatan tersebut biasanya terpisah dan hasilnya merupakan data yang pada umumnya dapat dipergunakan sebagai dasar analisa perbandingan. Kedua sumber tersebut penulis akan uraikan lebih lanjut dan terperinci pada bagian berikut ini.

D. Pencatatan Administrasi Penduduk

Pencatatan atau registrasi penduduk berfungsi dua sebagai berikut:

- a. Sebagai catatan resmi dari suatu peristiwa tertentu.
- b. Sebagai sumber yang berharga bagi penyusunan statistik penduduk yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan.

Di Indonesia registrasi penduduk ditangani oleh empat lembaga pemerintah yakni Departemen Dalam Negeri, Kehakiman, Kesehatan dan Agama. Justru di sini terjadi ketimpangan yang menyangkut wewenang, organisasi dan aparaturinya, sehingga ditambah dengan sikap masyarakat terhadap registrasi itu, data yang diperoleh masih selalu diragukan kebenarannya.

Di negeri yang maju ada registrasi penduduk berdasarkan undang-undang, lima atau sepuluh tahun sekali tersebut didampingi oleh sensus penduduk. Di negara kita sumber utama dari data penduduk adalah sensus yang diadakan setiap tahun sekali (sejak tahun 1961). Sensus kita dilengkapi dengan berbagai survey penduduk. Di Indonesia memang belum ada undang-undang registrasi penduduk karena bersifat sukarela sehingga angka-angkanya kurang memuaskan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa aparat pemerintah yang menangani langsung dalam hal ini pelaksanaan pencatatan penduduk yaitu ada empat yaitu:

- a. Departemen Kehakiman mencatat kejadian vital orang asing, kaum peranakan Cina dan golongan minoritas Kristen dan Khatolik serta beberapa kelompok penduduk tertentu, pelaksanaannya ditingkat kabupaten. Ini berdasarkan dengan undang-undang sipil dahulu.
- b. Departemen Dalam Negeri melakukan pencatatan kelahiran, kematian dan migrasi penduduk tingkat desa/kelurahan yang sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda, tetapi pelaksanaannya terbatas di Jawa dan Madura.
- c. Departemen Kesehatan mencatat registrasi kelahiran, kematian, ini dilakukan beranama desa/kelurahan dan camat.
- d. Departemen Agama mencatat orang yang kawin, cerai dan talak bagi penduduk yang beragama Islam.

Mengingat kepincangan di atas, kini dibentuk BPS (Biro Pusat Statistik) dengan dibiayai oleh Bank Dunia lewat BKKBN yang mensponsori proyek-proyek penelitian

guna mencari sistem registrasi baru yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Di bawah ini penulis dapat kemukakan beberapa sistem pencatatan penduduk sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Ruslan H. Prawiro (1983 : 34 - 4) yaitu sebagai berikut:

1. Sensus Penduduk

Sensus berasal dari bahasa latin yaitu "Censare" yang berarti menilai atau mengambil pajak. Tujuan sensus pada waktu ini ialah untuk mendapat data penduduk guna studi demografi untuk berbagai kepentingan, tetapi pada zaman dahulu biasanya untuk kepentingan militer, yaitu untuk milis pada zaman Romawi.

Lebih lanjut Drs. Ruslan H. Prawiro mengemukakan sebagai berikut:

" Pencatatan data penduduk demografi secara simultan oleh pemerintah, pada suatu waktu khusus terhadap semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu " (Ruslan H. Prawiro 1983 : 35)

Pencatatan penduduk dapat dilakukan dengan sensus "*De Facto dan De Yure*". Sensus *De Facto* adalah mencatat penduduk yang nyata ada di tempat pada saat dilakukan dengan pencatatan serentak. Keuntungannya bahwa dapat diperoleh angka yang pasti yang terdapat di suatu wilayah sensus yang ditetapkan. Sedangkan

kecanggihannya ialah angka data penduduk tersebut dipengaruhi oleh wisatawan, pedagang keliling dan lain sebagainya.

Sensus *De Yure* ditujukan kepada semua penduduk yang biasanya atau secara resmi berdiam di tempat itu. Bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel wilayah sensus, hanyalah bersifat permanen saja.

Di bawah ini diuraikan mengenai ciri-ciri sensus dalam pencatatan suatu negara yaitu:

- a. Sensus dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah saja.
- b. Sensus dilakukan terhadap penduduk di suatu wilayah yang batas-batasnya ditentukan secara pasti.
- c. Sensus merupakan pencatatan yang universal, menyeluruh terhadap semua penduduk negeri.
- d. Sensus sebaiknya merupakan pencatatan perorangan setiap penduduk di suatu wilayah.
- e. Pencatatan seluruh penduduk hendaklah dijalankan serentak dalam satu hari, meskipun dalam keadaan tertentu dapat menyimpang misalnya sangat luas atau dicapai sehingga memerlukan beberapa hari atau beberapa minggu.

2. Survey Sampel Penduduk

Mengumpulkan data dari seluruh penduduk menuntut biaya dan waktu serta tenaga. Oleh sebab itu maka

dilakukan survey untuk mengambil data serta menganalisisnya. Survey berarti penelitian ilmiah dan yang diteliti hanya mewakilinya saja. Sudah jelas bahwa dengan sampel kita hanya memperoleh data penduduk hanya sebahagian saja tetapi keadaan penduduk dapat diperkirakan dengan teliti misalnya besar keluarga, keadaan pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya. Agar sampel mencerminkan keadaan seluruh penduduk maka diberikan banyak contoh.

Karena pada survey sampel yang dikerjakan hanya data dari sebagian penduduk, maka hasilnya tidak setepat hasil penelitian seluruh penduduk meskipun demikian ada banyak keuntungan seperti biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan dengan pencatatan dan penelitian lengkap seluruh penduduk.

3. Sistem sistem Registrasi

Sensus dan survey pada umumnya merupakan pengambilan momen, ketika mendapatkan data untuk saat itu seperti ketika kita melihat sebuah photo tidak melihat gambar sebelum dan sesudahnya. Di negara yang sudah maju pada umumnya ada undang-undangnya yang mengatur registrasi tersebut yang dijalankan teratur dan tertib sehingga kejadian tersebut akan tercatat semua.

Di Indonesia sistem registrasi kependudukan belum ditentukan undang-undangnya sehingga warga

negara belum diwajibkan untuk mencatat segala kejadian vitalnya. Sistem registrasi masih simpang siur, belum ada sistem yang menentu, karena pekerjaan registrasi penduduk ditangani oleh empat instansi pemerintah yang *miss communication* atau kurang koordinasi.

Pelaksanaan registrasi pada instansi-instansi tersebut kurang teratur sehingga data yang terkumpul juga kurang berguna untuk analisa demografi sebab diragukan validitasnya. Sebaliknya ada satu sistem registrasi seragam seluruh negara dan ini memang sudah mulai dirintis oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Kesadaran mencatat belum berkembang di dalam masyarakat berhubung masyarakat belum tahu akan kegunaannya. Kadang-kadang petugas mengalami banyak kesulitan karena kurangnya fasilitas, terutama di daerah yang jarang penduduknya.

E Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Kelurahan

Guna untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 5 Tahun 1975 tentang pemerintahan desa, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang

pelaksanaan administrasi penduduk di kelurahan agar supaya mencatat dan menregisterasi penduduk di kelurahan yang berdomisili di wilayahnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982, pada bab I pasal 2 yang dikutip oleh Drs Frans Bona Sihombing 1990 : 135 dinyatakan bahwa:

1. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk pada buku administrasi penduduk di kelurahan.
2. Penduduk desa/kelurahan adalah setiap orang yang berdiam sementara dalam wilayah kelurahan untuk jangka waktu tertentu yaitu 180 hari.
3. Perubahan penduduk di kelurahan adalah mutasi penduduk yang terjadi dalam suatu wilayah karena pindah atau meninggal, lahir atau datang.
4. Kartu keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung dibawah oleh camat yang mempunyai hak otonomi.

Selanjutnya dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dalam buku yang sama juga dijelaskan mengenai buku administrasi penduduk yang meliputi:

1. Buku Induk Penduduk
2. Buku Penduduk Sementara
3. Buku Perubahan Penduduk
4. Buku Perkembangan Penduduk
5. Buku Kartu Keluarga
6. Buku Kartu Tanda Penduduk
7. Buku Jumlah Penduduk

Ad.1. Buku Induk Penduduk

Buku ini diisi langsung oleh pemerintah kelurahan secara lengkap dan benar berdasarkan keterangan dan bukti secara benar. Buku ini merupakan buku yang lengkap mengenai data dari seorang penduduk.

Ad.2. Dalam buku induk penduduk dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama lengkap/Panggilan
- c. Tempat dan tanggal lahir atau umur
- d. Jenis kelamin
- e. Status Perkawinan
- f. Kewarganegaraan
- g. Agama
- h. Pendidikan terakhir
- i. Dapat membaca huruf
- j. Pekerjaan

- k. Kedudukan dalam keluarga
- l. Alamat lengkap
- m. Tanggal mulai pindah/meninggalkan kelurahan

Ad.3. Buku Penduduk Sementara

Setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu kelurahan baik dalam rangka kunjungan keluarga maupun kunjungan lainnya yang berstatus sebagai tamu dan diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada kepala keluarga dalam jangka waktu paling lambat dua kali dua puluh empat jam untuk dicatat dalam buku sementara.

Buku ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama Lengkap
- c. Jenis Kelamin
- d. Nomor Identitas
- e. Tanggal dan Tempat lahir
- f. Pekerjaan
- g. Kewarganegaraan
- h. Datang Dari
- i. Maksud Kedatangannya
- j. Nama dan Alamat yang didatangi
- k. Datang pada Tanggal

Ad.4. Buku Perubahan Penduduk

Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarga kepada kepala kelurahan, dalam jangka waktu 14 hari setiap perubahan yang terjadi bagi seorang penduduk harus dicatat dalam buku perubahan penduduk.

Buku perubahan penduduk memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama lengkap
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Tambah karena datang
- g. Tambah karena lahir

4.2. Buku Perkembangan Penduduk

Pada setiap akhir bulan yang bersangkutan pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mengisi buku perkembangan penduduk dan melaporkannya kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II melalui camat, yang selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setiap tiga bulan yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali. Pencatatan

data perkembangan penduduk yang dimaksud harus disesuaikan dengan buku induk penduduk, laporan perkembangan penduduk dibuat tiga rangkap yaitu:

- a. Lembar pertama untuk disampaikan kepada Wali-kotamadya Kepala Daerah Tingkat II
- b. Lembar kedua untuk arsip ditingkat kecamatan
- c. Lembar ketiga untuk arsip ditingkat kelurahan dengan cara mengisi formulir.

Kelurahan mengisi formulir. Buku ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Jumlah penduduk awal bulan ini
- c. Jumlah kelahiran bulan ini
- d. Jumlah penduduk pendatang bulan ini
- e. Jumlah penduduk pindah bulan ini
- f. Buku kartu keluarga

Untuk mengetahui jumlah kepala keluarga, anggota keluarga dan identitas masing-masing anggota keluarga, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pencatatan melalui buku keluarga. Buku ini harus di bawah pada waktu melaporkan perubahan keluarga untuk diadakan penyesuaian.

Di dalam buku keluarga dan buku kartu keluarga memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama lengkap
- c. Jenis kelamin
- d. Hubungan dengan kepala keluarga
- e. Tanggal dan tempat lahir
- f. Status perkawinan
- g. Agama
- h. Kewarganegaraan
- i. Pendidikan terakhir
- j. Membaca/menulis
- k. Kepindahan dari
 - l. Nama bapak/ibu
 - m. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4.1.7. Buku Kartu Tanda Penduduk

Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk dan selanjutnya pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mendaftarkan dalam buku kartu tanda penduduk setiap KTP yang telah dikeluarkan kepada penduduk.

Dalam buku kartu tanda penduduk memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor Urut
- b. Nama lengkap/sebutan
- c. Jenis kelamin

- d. Tempat dan tanggal lahir/umur
- e. Agama
- f. Pendidikan
- g. Kewarganegaraan
- h. Pekerjaan
- i. Alamat
- j. Pas Foto
- k. Nomor kartu keluarga
- l. Golongan Darah

3.1.3. Buku Jumlah Penduduk

Setiap 3 bulan pada akhir bulan yang bersangkutan pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatat keadaan penduduknya dalam buku jumlah penduduk. Kutipan buku tersebut dilaporkan oleh kepala kelurahan kepada Walikotaamadya melalui Camat tiap tiga bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan.

Selanjutnya Walikotaamadya setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkannya kepada Gubernur dan Gubernur melaporkannya setiap setahun sekali kepada Menteri Dalam Negeri. Buku ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk
- b. Jumlah kepala keluarga
- c. Perincian jumlah penduduk berdasarkan umur

- d. Perincian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
- e. Perincian penduduk berdasarkan pendidikan
- f. Perincian jumlah penduduk berdasarkan Agama
- g. Perincian jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Berdirinya Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo menurut sejarahnya didirikan sekitar tahun 1945 yang berdiri atas tanah pada Kerajaan Tallo dengan bangunan permanen tetap beratap seng. Kantor Kecamatan Tallo awal mulanya diresmikan oleh Walikota Makassar.

Selama ada kantor Kecamatan Tallo sebagai fungsi pemerintahan ditingkat kecamatan dan sebagai ujung tombak yang langsung melaksanakan pemerintahan dalam menyukseskan dan merencanakan, merealisasikan program yang telah ditetapkan ditingkat kecamatan merupakan wujud realisasi yang nyata sebagai fungsi wewenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pemerintahan dan berfungsi sebagai administrator. Fungsi merealisasikan di segala bidang, stabilitas dan dinamisator, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984 perihal tentang struktur pemerintahan ditingkat kecamatan. Kecamatan Tallo pada waktu itu hanya terdiri dari 7 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Tallo
- b. Kelurahan Lakkang
- c. Kelurahan Rappo Kalling

- d. Kelurahan Rappo Jawa
- e. Kelurahan Kalukuang
- f. Kelurahan Panampu
- g. Kelurahan Kalukubodea

Mengingat perkembangan yang begitu pesat dalam wilayah Kecamatan Tallo baik ditingkat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk seluruh warga negara yang terdapat di wilayah kecamatan tersebut, sehingga sangat perlu untuk pengembangan dan pemekaran dari setiap kelurahan yang telah dijelaskan di atas dari 7 kelurahan menjadi 15 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Tallo
- b. Kelurahan Lakkang
- c. Kelurahan Rappo Kalling
- d. Kelurahan Rappo Jawa
- e. Kelurahan Kalukuang
- f. Kelurahan Panampu
- g. Kelurahan Kalukubodea
- h. Kelurahan Capoa
- i. Kelurahan Walawalayya
- j. Kelurahan Tammua
- k. Kelurahan Bunga Eja Beru
- l. Kelurahan Lembo
- m. Kelurahan Ujung Pandang Baru

n. Kelurahan Buloa

o. Kelurahan La'latang

Kecamatan Tallo mempunyai luas wilayah 692 Ha.

Kecamatan ini terletak di bagian Utara Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya

Sebelah Timur berbatasan dengan lautan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala

B. Keadaan Demografi Kecamatan Tallo

Sebelum penulis menguraikan mengenai demografi, ada ada baiknya kita mengetahui kehidupan sosial budaya sebuah masyarakat majemuk Berikut ini dapat dikemukakan jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Tallo perkelurahan, yaitu:

1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Jumlah penduduk dan penyebarannya yang ada di Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
PER KELURAHAN DI KECAMATAN TALLO
AKHIR TAHUN 1995

No.	KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Tallo	4.023	4.098	8.121
2	Lakkang	520	530	1.050
3	Rappo Kalling	5.452	5.552	11.004
4	Rappo Jawa	4.730	4.789	9.492
5	Kalukuang	4.321	4.400	8.721
6	Panampu	6.821	6.946	13.767
7	Kalukubodoa	6.769	6.894	13.663
8	Suangga	4.570	4.654	9.244
9	Walawalayya	5.910	6.019	11.929
10	Tamman	4.276	4.457	8.733
11	Buanga Eja Baru	5.733	5.800	11.533
12	Lembu	5.127	5.221	10.348
13	Ujung Pandang Baru	3.605	3.672	7.277
14	Buloa	3.590	3.657	7.247
15	La'latang	3.477	3.540	7.017
	j u m l a h	69.047	70.319	139.366

Sumber data : Kantor Kecamatan Tallo Tahun 1995

2. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan

Mengenai jumlah penduduk dilihat menurut kewarganegaraan secara keseluruhan dalam wilayah kecamatan Tallo terbagi atas 2 bagian yaitu:

a. WNI (Warga Negara Indonesia) : 139.059

- Pria : 68.907

- Wanita : 70.152

b. WNA (Warga Negara Asing) : 307

- Pria : 140

- Wanita : 167

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Mengenai jumlah penduduk menurut agama yang diamati secara keseluruhan, dapat dilihat pada bagian dibawah ini:

a. Agama Islam : 139.183 Jiwa

b. Agama Kristen Katolik : 90 Jiwa

c. Agama Kristen Protestan : 63 Jiwa

d. Agama Hindu : 10 Jiwa

e. Agama Buddha : 20 Jiwa

4. Kondisi Penduduk menurut Mata Pencaharian

a. Pedagang/pengusaha : 500 Orang

b. Peternak : 73 Orang

c. Nelayan : 85 Orang

d. Pengrajin : 130 Orang

e. Pegawai Negeri/Swasta : 700 Orang

f. A B R I	:	217 Orang
g. Pensiunan (PNS/ABRI)	:	513 Orang
h. Lain-lain	:	311 Orang

5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Di Kecamatan Tallo dapat dirinci mengenai jumlah penduduk menurut pendidikan yang dimiliki warga masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak tamat SD/Sederajat	:	7.277 Orang
b. Tamat SMP/Sederajat	:	13.348 Orang
c. Tamat SLTP/Sederajat	:	11.017 Orang
d. Tamat SMUTA/Sederajat	:	9.482 Orang
e. Tamat Akademi/Sederajat	:	7.012 Orang
f. Tamat Perguruan Tinggi	:	5.437 Orang
g. Buta huruf	:	

C. Sarana dan Fasilitas di Kecamatan Tallo

1. Sarana Kerja Kantor Kecamatan

a. Kantor Kelurahan	:	15 Buah
b. Balai Pertemuan	:	1 Buah

Sedangkan fasilitas kerja dalam kantor kecamatan yaitu:

a. Telepon	:	1 Buah
b. Mesin Ketik	:	6 Buah
c. Meja dan kursi kerja	:	28 Buah
d. Meja dan kursi tamu	:	2 Buah
e. Lemari	:	7 Buah

2. Sarana Perekonomian

a. Koperasi

- Koperasi simpan pinjam : 4 Buah
- Koperasi Unit Desa : 1 Buah
- Koperasi Lain-lain : 5 Buah

b. Jumlah Pasar

- Pasar Umum : 1 Buah
- Pasar Semi Permanen : 4 Buah
- Toko/Supermarket/Warung : 35 Buah

3. a. Pendidikan

- Sekolah TK : 6 Buah
- Sekolah Dasar Inpres : 8 Buah
- Sekolah Dasar Negeri : 22 Buah
- Madrasah Ibtidaiyah : 2 Buah
- S L T P : 3 Buah
- S L T A : 2 Buah
- Madrasah Alim : 2 Buah
- Kejuruan : 2 Buah
- Akademi : 1 Buah
- Perguruan Tinggi : 1 Buah

b. A g a m a

Jumlah tempat ibadah

- M e s j i d : 28 Buah
- Mushallah / Surau : 4 Buah
- G e r e j a : 2 Buah

c. Pariwisata

- Tempat bersejarah : 1 Buah

d. Kesehatan

- Puskesmas : 2 Buah

- Pos Yandu : 15 Buah

D. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Tallo

Sebagai pengejawantahan dari pada tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam lingkungan wilayah Kecamatan Tallo, maka diperlukan adanya tenaga-tenaga yang cakap, profesional, terampil, berdedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya sehingga tercipta suatu bagian pekerjaan (*Delegation Of Job*) yang dibebankan kepadanya.

Salah satu tugas pemerintahan wilayah kecamatan adalah dalam hal pemantauan dan kecerdasan dalam menyusun dan mengadministrasikan seluruh warga masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing termasuk registrasi kependudukan yang ada di kecamatan tersebut.

Untuk itu seluruh aparat pemerintah yang ditugaskan di Kecamatan Tallo senantiasa mencurahkan

tenaga dan pikirannya terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama dan warga masyarakatnya maupun untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan menuju yang lebih maju sehingga para elite politik memikirkan aparatnya guna dibekali keterampilan untuk mengantisipasi modernisasi.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dari aparat pemerintah setempat tidak menyerah dan lalai akan tugas yang dibebankan kepadanya guna mengatur masyarakat serta memberikan penyuluhan dan bimbingan agar nantinya dapat memahami, menjiwai, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di kecamatan tersebut.

Kita ketahui bahwa Kecamatan Tallo dengan jumlah tenaga pegawai dan sarana yang masih kurang dibandingkan dengan pekerjaan yang dilaksanakannya.

Baka dari itu dapat diuraikan mengenai jumlah pegawai Kecamatan Tallo dilihat dari tingkatannya yaitu:

1. Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II
 KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S D	5 Orang
2.	S M P	1 Orang
3.	S M A	15 Orang
4.	Sarjana Muda	2 Orang
5.	Sarjana	8 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Akhir 1995

Dengan melihat data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya pegawai di Kecamatan Tallo menurut tingkat pendidikan yang paling banyak terdapat pada klasifikasi Pendidikan SMA sebanyak 15 orang, berikutnya Sarjana sebanyak 8 orang, SD terdapat 5 orang, klasifikasi Tingkat Sarjana Muda sebanyak 2 orang dan Tingkat SMP sebanyak 1 orang.

3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

Klasifikasi pegawai menurut tingkat golongan di Kecamatan Tallo dapat diketengahkan pada tabel berikut ini:

TABEL III
 KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT TINGKAT GOLONGAN

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	8 Orang
2.	Golongan II	12 Orang
3.	Golongan III	11 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Akhir 1995

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya klasifikasi pegawai menurut golongan yang paling dominan serta yang banyak ada terdapat pada golongan II sebanyak 12 orang, berikutnya pada golongan III sebanyak 11 orang dan terdapat hanya 8 orang dengan klasifikasi golongan I.

a. Klasifikasi Pegawai menurut Masa Kerjanya

Klasifikasi pegawai menurut masa kerja yang ada di Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV
 KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT MASA KERJANYA

No.	Masa Kerja	Jumlah
1.	0 - 5 Tahun	-
2.	6 - 10 Tahun	5 Orang
3.	11 - 15 Tahun	7 Orang
4.	16 - 20 Tahun	11 Orang
5.	21 Tahun ke atas	8 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Akhir 1995

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya klasifikasi pegawai menurut masa kerjanya yang paling dominan adalah tingkat masa kerja 16 - 20 tahun sebanyak 11 orang, selanjutnya masa kerja 21 tahun ke atas sebanyak 8 orang, masa kerja 11 - 15 tahun sebanyak 7 orang, sedangkan paling rendah adalah masa kerja 0 - 5 tahun tidak ada.

Jika kita menganalisa tabel di atas berarti rata-rata pegawai di Kecamatan Tallo mempunyai masa kerja cukup memadai yang merupakan aset yang dapat mengembangkan kecamatan tersebut ke yang lebih baik.

4. Keadaan Pegawai menurut Umur

Klasifikasi pegawai menurut umur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Tallo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL V
KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT UMUR / USIA

No.	Umur / Usia	Jumlah
1.	20 - 25 Tahun	2 Orang
2.	26 - 30 Tahun	3 Orang
3.	31 - 35 Tahun	7 Orang
4.	36 - 40 Tahun	12 Orang
5.	41 Tahun ke atas	7 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Akhri 1995

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya pegawai yang ada di Kecamatan Tallo yang paling dominan adalah kelompok umur antara 36 - 40 tahun sebanyak 12 orang, kelompok umur antara 31 - 35 tahun sebanyak 7 orang, kelompok umur 41 tahun ke atas sebanyak 7 orang, sedangkan kelompok umur 26 - 30 tahun sebanyak 3 orang dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 20 - 25 tahun hanya 2 orang.

Kalau kita menarik suatu solusi bahwa pada umumnya pegawai yang ada di Kecamatan Tallo rata-rata sudah senior berdasarkan umurnya dan kelihatannya pegawai tersebut cukup produktif untuk mengembangkan misi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pengaturan pengadministrasian penduduk di wilayah kerjanya jika ditinjau dari sudut umurnya.

5. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin yang ada di Kecamatan Tallo dapat diketengahkan pada tabel di bawah ini:

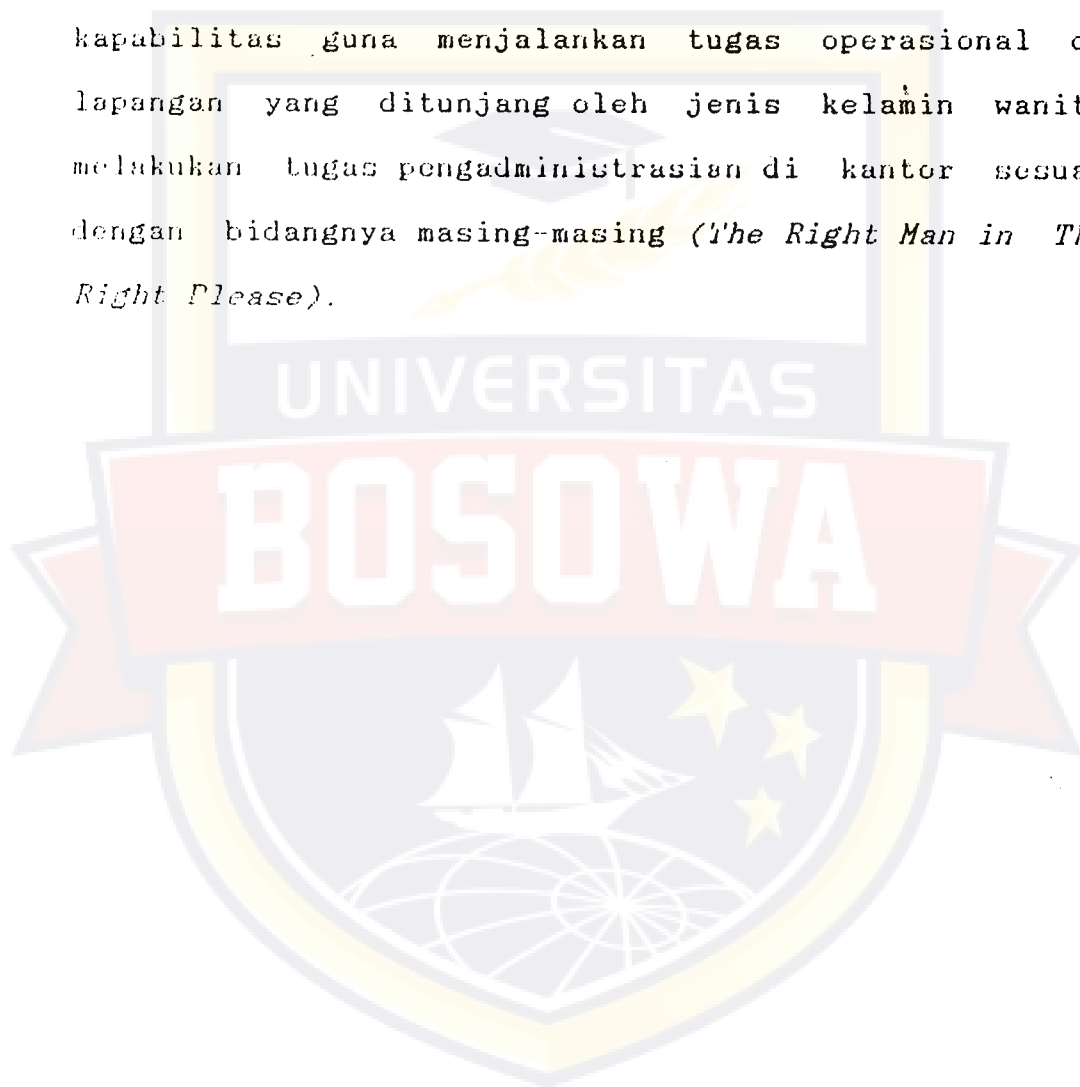
TABEL VI
KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	19 Orang
2	Wanita	12 Orang
	Jumlah	31 Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Akhir 1995

Berdasarkan dengan data-data yang ada pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya klasifikasi pegawai menurut jenis kelamin di Kecamatan Tallo, terlihat jelas bahwa Pria jumlahnya 19 orang sedangkan Wanita jumlahnya hanya 12 orang.

Dengan melihat klasifikasi tersebut, maka saya sebagai penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa di Kantor Kecamatan Tallo, klasifikasi menurut jenis kelamin yang paling dominan berada pada jenis kelamin Pria sebanyak 19 orang yang tentunya memiliki kapabilitas guna menjalankan tugas operasional di lapangan yang ditunjang oleh jenis kelamin wanita melakukan tugas pengadministrasian di kantor sesuai dengan bidangnya masing-masing (*The Right Man in The Right Please*).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Registerasi Kependudukan di Kec. Tallo

Pelaksanaan registerasi kependudukan di Kotamadya Ujung Pandang, serentak dilaksanakan sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk yang diperkuat dengan diterbitkannya keputusan Mendagri No. 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk yang dilakukan segenap aparat pemerintah Dati I dan Dati II, baik lingkup Departemen Dalam Negeri maupun instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan registerasi penduduk di wilayah kerjanya masing-masing.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penelitian dan pembahasan ini, penulis menekankan pelaksanaan registerasi penduduk khususnya di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dengan obyek sample penelitian di Kecamatan Tallo yang dilakukan oleh segenap aparat pemerintah wilayah Kecamatan Tallo beserta masyarakat Tallo dengan jumlah populasi 139.366 dengan sample 60 orang.

Di Kecamatan Tallo terdiri dari 15 kelurahan, yang dulunya hanya 7 kelurahan, tetapi banyaknya kebutuhan penduduk maka kelurahan tersebut dimekarkan pada tahun 1983 yang sejak dulu melaksanakan regis-

terasi penduduk di kelurahannya masing-masing. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1977. Pelaksanaan registrasi kependudukan dalam Kecamatan Tallo menampakkan perkembangan jumlah dari tahun ke tahun, ini menampakkan betapa giatnya aparat pemerintah kecamatan beserta dengan aparatnya yang ada di kelurahan guna melakukan berbagai tugas pemerintahan dan pembinaan warga masyarakatnya untuk memajukan daerah kerjanya masing-masing.

Dalam pelaksanaan registrasi penduduk sebagai bahan data analisis pada penulisan skripsi ini, di mana Kepala Wilayah Kecamatan selaku penanggung jawab penuh dan penguasa tunggal dalam wilayah kerjanya itu untuk senantiasa menginstruksikan kepada segenap aparat aparat yang ada di wilayah kerjanya masing-masing untuk memikul tanggung jawab dalam semua kegiatan pemerintahan termasuk di setiap kelurahan untuk dilaporkan ke Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang guna diketahui perkembangan kependudukan di wilayah kerjanya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan kepala wilayah kecamatan dan sekretaris Kecamatan Tallo sejalan dengan pelaksanaan sistem registrasi kependudukan di dalam lingkup wilayah

kerjanya itu beliau mengatakan bahwa "Efektifitas registrasi kependudukan di setiap kelurahan selama Tahun 1995, kepala wilayah dan sekretarisnya memanggil kepala kelurahan untuk diberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan registrasi kependudukan di lingkungan kerjanya masing-masing, disertai dengan penerimaan buku paket dan blangko pengisian atau pencatatan penduduk keseragaman.

Demikian pula kepala kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tallo, juga mengajarkan kepada segenap perangkatnya masing-masing sesuai dengan yang diterima dari Kepala Wilayah Kecamatan untuk dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama antara kepala kelurahan dan stafnya. Setelah staf mengetahui lebih jauh sehubungan dengan pelaksanaan registrasi penduduk, maka kepala kelurahan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk didatangi dari rumah ke rumah guna pendataan secara mendetail ataupun warga masyarakat dengan sepenuh hati melaporkan data-datanya kepada pihak aparat pemerintah setempat.

Dengan pelaksanaan registrasi kependudukan ini di setiap kelurahan yang ada di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dapat memperoleh data data secara terperinci mengenai komposisi penduduk dalam lingkup kerjanya.

Dalam mengembang tugas dan tanggung jawab tersebut segenap aparat pemerintah kelurahan yang ada di kecamatan itu dengan segala kemampuan yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari warga masyarakatnya tentunya diperlukan kejelian dan kepekaan dengan berbagai teknik dan metode guna merangkul warganya yang sekaligus sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dan pelayanan masyarakat. Namun dibalik itu banyak pula kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan registerasi penduduk, yaitu warga masyarakat merasa takut diambil data pribadinya dengan keluarga dan anak-anaknya, ada yang susah ditemui di rumahnya karena kesibukan pekerjaannya, ada yang tinggal di daerah terpencil sehingga petugas kesulitan untuk menjangkau dan masih banyak problem lain yang ditemui petugas termasuk penduduk yang keluar masuk di daerah tersebut. Sejalan dengan uraian tersebut di atas, pada dasarnya para kepala kelurahan memberikan respon yang mengatakan bahwa dalam menghadapi warga masyarakat yang demikian itu, mereka dapat diperoleh data-data identitas dirinya beserta keluarga dan anaknya pada saat berurusan dengan pemerintah kecamatan/kelurahan seperti meminta surat izin keramaian untuk pesta, pengurusan KTP untuk kegiatan usahanya, izin penguburan atau kematian anak-

nya/keluarganya. Pada saat itulah masyarakat terjaring dan dengan mudah memperoleh data-data yang pasti.

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan registrasi penduduk setiap kelurahan yang ada di kecamatan tersebut, maka hasil pendapatan registrasi penduduk yang telah diperoleh di lapangan untuk diolah dan disusun sedemikian rupa pada setiap bulan untuk dilaporkan pada setiap bulan ke kepala wilayah kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban atas instruksi yang diberikan itu.

Adapun yang menjadi alat ukur untuk mengetahui jalannya pelaksanaan sistem registrasi kependudukan pada penelitian dengan beberapa klasifikasi penilaian dengan indikatornya sebagai bahan rujukan yaitu:

Klasifikasi Penilaian	Indikator
a. Lancar	: Aktif melakukan pencatatan penduduk yang ke luar atau masuk dan tak menjalan hambatan (sangat agresif, ulet serta giat).
b. Cukup lancar	: Cukup aktif melakukan pencatatan penduduk yang masuk atau ke luar dan sedikit hambatan (cukup agresif, asal kerja dan tidak ulet).

- c. Kurang lancar : Tidak aktif melakukan pencatatan penduduk yang keluar atau masuk dan banyak hambatan (tidak mau bekerja dan tidak ulet).

TABEL VII

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN REGISTRASI
KELAHIRAN DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T.Agama	T.Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Lancar	9	1	-	7	17	26,3
2.	Cukup lancar	22	4	3	1	30	50
3.	Kurang lancar	3	-	1	9	13	21,7
Jumlah		34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan 17 orang (28,3%) mengatakan lancar, terdapat 30 orang (50%) mengatakan cukup lancar dan hanya 13 orang (21,7%) yang mengatakan kurang lancar.

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan registrasi kelahiran di Kecamatan Tallo terlihat berjalan cukup lancar bahwa beberapa responden mengatakan berjalan

lancar, ini menunjukkan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan secara efektif. Petugas registrasi dengan cukup agresif dalam kegiatan menunaikan tanggung jawabnya terkadang timbul kendala karena beraneka ragam karakter dan prilaku warga masyarakat yang serba kompleks dengan perbuatannya itu.

Di samping itu pula ada respon yang mengatakan kurang lancar dalam pelaksanaan registrasi kelahiran disebabkan karena warga masyarakat yang sebagian juga melalaikan dan menganggap biasa dalam kelahiran bayi sehingga merasa tidak perlu dilaporkan, ada yang merasa takut akibat perbuatannya itu dan merasa malu melaporkannya, sehingga merepotkan petugas untuk mendata.

TABEL VIII

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN REGISTRASI
KEMATIAN DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T.Agama	T.Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Lancar	18	3	3	4	28	46,7
2.	Cukup lancar	10	1	1	7	18	31,7
3.	Kurang lancar	6	1	-	6	13	21,6
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan 28 orang (46,7%) mengatakan lancar, terdapat 19 orang (31,7%) mengatakan cukup lancar dan yang mengatakan kurang lancar hanya 13 orang (21,6%).

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan registrasi kematian di Kecamatan Tallo menunjukkan sudah berjalan lancar dan ada juga yang mengatakan cukup lancar, hal ini disebabkan karena adanya kerja sama yang baik antara para petugas registrasi dengan warga masyarakatnya di mana pada saat mengalami kematian dari keluarganya/tetangga dengan cepat melaporkan diri pada petugas pemerintah guna memperoleh surat izin pemakaman. Demikian juga aparat pemerintah dengan giat membantu warga masyarakat yang tertimpa musibah untuk diberikan surat izin penguburan pada setiap warga yang melaporkan diri dan tidak ada kesulitan untuk mendapatkannya.

Namun dari itu pula respon yang mengatakan pelaksanaan registrasi kematian belum berjalan dengan lancar, hal ini adanya sebagian warga yang tak melaporkan diri pada saat tertimpa musibah kematian untuk melaporkannya. Serta biasanya atas amanah dari yang meninggal untuk dikuburkan sendiri di halaman rumahnya, sehingga bagi petugas tidak mengetahui kalau

ada warganya mengalami musibah dan tidak terdaftar dalam buku registrasi kematian.

TABEL IX

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN REGISTRASI MIGRASI MASUK (PENDATANG) DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agama	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Lancar	13	1	1	2	17	28,3
2.	Cukup lancar	13	1	1	2	18	30
3.	Kurang lancar	8	3	2	13	25	41,7
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan 17 orang (28,3%) mengatakan lancar, terdapat 18 orang (30%) mengatakan cukup lancar dan 25 orang (41,7%) mengatakan kurang lancar.

Berdasarkan data itu, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan registrasi untuk migrasi masuk (pendatang) di Kecamatan Tallo terlihat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan karena penduduk yang masuk tersebar di 15 kelurahan tidak melaporkan diri pada petugas, sehingga petugas banyak

mengalami hambatan untuk melakukan pendataan pada seluruh pendatang.

Namun dari itu pula ada yang mengatakan cukup lancar dan bahkan mengatakan lancar, hal ini disebabkan karena timbulnya inisiatif dari warga pendatang yang masuk di kecamatan tersebut untuk membantu petugas dalam melakukan pendataan warga pendatang dengan agresif, ulet dan giat sehingga tujuan efektifitas registrasi kependudukan dapat tercapai.

TABEL X

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN REGISTRASI
MIGRASI KELUAR (PINDAH) DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agama	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Lancar	17	1	1	-	19	31,7
2.	Cukup lancar	10	1	1	-	12	20
3.	Kurang lancar	7	3	2	17	29	48,3
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan 19 orang (31,7%) mengatakan lancar, 12 orang (20%) mengatakan cukup lancar dan terdapat 29 orang (48,3%) yang mengatakan kurang lancar.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan migrasi keluar pada kelurahan di Kecamatan Tallo terlihat belum berjalan lancar hal ini disebabkan karena warga masyarakatnya belum sepenuhnya menunjukkan keikutsertaannya membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah dalam pekerjaannya, sehingga pada gilirannya petugas tidak antusias melakukan tugas-tugas dengan baik disebabkan kurang kerjasama antara aparat dan warga masyarakat.

Pada tabel yang sama ada responden mengatakan lancar dan cukup lancar dalam melakukan registrasi penduduk pindahan, hal ini karena dorongan dari warga masyarakat itu sendiri yang meminta untuk diberikan surat keterangan pindahan ke tujuan baru, sehingga dengan sendirinya petugas tak mengalami hambatan untuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap bulannya.

B. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Pelaksanaan Registrasi Kependudukan di Kecamatan Tallo

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban pada segenap aparat pemerintah di wilayah Kecamatan Tallo sangat dituntut kebersamaan dan keterpaduan menggalang seluruh warga masyarakat yang ada, guna mensukseskan berbagai program kerja dalam wilayah kerjanya. Salah satu di antaranya menjadi

tugas pokok administrasi kependudukan yang mencakup pencatatan registrasi kelahiran, kematian dan migrasi masuk/keluar. Penerbitan buku tersebut dituntut kebersamaan dan keterpaduan dalam menunaikan tugasnya serta diperlukan adanya kecakapan.

Demikian pula halnya dengan segenap warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tallo sangat diharapkan dukungan dan peran serta aparat pemerintah setempat membantu dan mendorong terlaksananya program kerja khususnya dalam bidang pemerintahan yaitu dengan penuh perhatian dan kesadarannya.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka untuk mengetahui tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap pelaksanaan registrasi kependudukan khususnya di Kecamatan Tallo maka perlu ditetapkan alat ukur yang menjadi indikator, sebab membahas tingkat kesadaran masyarakat merupakan suatu sifatnya abstrak sehingga diperlukan tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap efektifitas registrasi kependudukan.

Adapun tolak ukur yang menjadi pegangan bagi penulis untuk mengetahui tingkat kesadaran penduduk dengan menggunakan skala tertentu yaitu:

- a. Skala Tinggi : Antusias masyarakat melaporkan diri pada petugas sebelum dikunjungi di rumahnya.

b. Skala Sedang : Masyarakat bersedia memberikan keterangan dan informasi apabila dikunjungi oleh petugas.

c. Skala Rendah : Masyarakat tidak melaporkan diri dan tidak memberikan keterangan dan informasi pada saat dikunjungi dan didatangi oleh petugas.

TABEL XI

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI TINGKAT KESADARAN
PADA PENDUDUK TERHADAP REGISTRASI KELAHIRAN
DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agama	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Tinggi	11	2	1	9	23	38,3
2.	Sedang	14	2	2	7	25	41,7
3.	Rendah	9	1	1	1	12	20
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap registrasi kelahiran sesuai dengan tanggapan responden dengan memberikan penilaian tinggi yaitu 23 orang (38,3%), penilaian kategori sedang 25 orang (41,7%) dan penilaian kategori rendah yaitu hanya 12 orang (20%).

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran penduduk terhadap pelaksanaan registrasi kelahiran di Kecamatan Tallo menunjukkan kategori penilaian kesadaran penduduk sedang diikuti oleh kesadaran tinggi yang hampir seimbang. Ini menunjukkan masyarakat cukup membantu dan mendukung pemerintah setempat dalam upaya efektifitas registrasi kependudukan khususnya penduduk yang melahirkan baik di rumah sakit maupun melalui dukun. Namun ada pula warga masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran rendah yang tak melaporkan diri tetapi jumlahnya relatif kecil.

TABEL XII

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI TINGKAT KESADARAN
PENDUDUK TERHADAP REGISTRASI KEMATIAN
DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agana	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Tinggi	13	2	1	5	21	35
2.	Sedang	17	2	3	7	29	48,3
3.	Rendah	4	1	-	5	10	16,7
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap registrasi kematian sesuai dengan tanggapan responden dengan memberikan penilaian tinggi yaitu 21 orang (35 %), penilaian kategori sedang 29 orang (48,3%) dan penilaian tingkat kesadaran rendah sebanyak 10 orang (16,7%).

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran penduduk terhadap pelaksanaan registrasi kematian di Kecamatan Tallo menunjukkan kategori penilaian tingkat kesadaran sedang dan ada juga yang memberikan respon kesadaran yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat dengan penuh perhatian dan antusias melaporkan diri pada pemerintah apabila mengalami kematian baik dari pihak keluarganya, sahabatnya, tetangganya untuk meminta izin penguburan/pemakaman di tempat-tempat yang telah ditentukan.

TABEL XIII

**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KESADARAN PENDUDUK
BERIMIGRASI MASUK (PENDATANG) MEMATUHI
KEWAJIBAN MENCATATKAN DIRI PADA
PEMERINTAH DI KECAMATAN TALLO**

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T.Agama	T.Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Tinggi	4	-	1	5	10	16,7
2.	Sedang	11	2	1	5	19	31,7
3.	Rendah	19	3	2	7	31	51,7
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap registrasi pendatang sesuai dengan tanggapan responden dengan memberikan penilaian tinggi yaitu 10 orang (16,7%), dan penilaian sedang 19 orang (31,7%) dan penilaian kategori rendah 31 orang (51,7%)

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran penduduk terhadap pelaksanaan registrasi pendatang di Kecamatan Tallo, menunjukkan kategori penilaian rendah. Ini menunjukkan warga masyarakat belum sepenuhnya menyadari dan mematuhi kewajiban untuk mencatatkan diri pada aparat pemerintah terutama baik warga masyarakat/pendatang untuk mencari pekerjaan,

menetap di wilayah kecamatan tersebut atau menetap sementara di rumah keluarganya, padahal segenap aparat pemerintah mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang ada di setiap kelurahan untuk melaporkan diri bilamana ada keluarganya atau sahabat yang akan tinggal baik sementara maupun menetap.

Bahkan ada pula yang mengatakan kesadaran penduduk yang tinggi dan sedang tetapi jumlahnya relatif kecil. Ini merupakan indikator bahwa di antara sekian banyak penduduk di Kecamatan Tallo sebagian telah melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.

TABEL XIV

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KESADARAN PENDUDUK BERIMIGRASI KELUAR (PINDAH) DALAM MEMATUHI KEWAJIBAN MELAPORKAN DIRI PADA PEMERINTAH DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kcc./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T.Agama	T.Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Tinggi	3	3	2	3	11	18,3
2.	Sedang	17	1	1	2	21	35
3.	Rendah	14	1	1	12	29	48,3
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap registrasi pindahan sesuai dengan tanggapan responden dengan memberikan penilaian tertinggi yaitu 11 orang (18,3%) penilaian kategori sedang 21 orang (35%) dan penilaian dengan kategori kesadaran rendah sebanyak 29 orang (48,3%).

Berdasarkan dengan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran penduduk terhadap pelaksanaan registrasi pindahan menunjukkan penilaian rendah. Ini menunjukkan warga masyarakat yang pindah tidak melaporkan ke aparat setempat.

Di samping itu juga ada responden yang mengatakan tingkat kesadaran penduduk yang akan pindah cukup memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara yang sadar hukum.

C. Faktor Faktor yang Berpengaruh dalam Efektifitas Registrasi Penduduk di Kecamatan Tallo

Guna menunjang berbagai kegiatan program pemerintah dalam melakukan registrasi penduduk di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang, maka sangat perlu memperhatikan beberapa faktor dalam segenap aparat dalam rangka menunaikan tugas yang dibebankan berdasarkan dengan hasil wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka efektifitas registrasi kependudukan oleh segenap pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam lingkungan kerjanya masing-masing sangat perlu adanya bekal berupa pengetahuan mengenai mekanisme kerja yang dilakukan apabila sudah terjun ke lapangan melakukan pendataan penduduk sesuai dengan Kepres No. 62 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk. Peraturan Mendagri No. 8 tahun 1977, tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk serta peraturan Mendagri No. 7 tahun 1977 tentang pelaksanaan administrasi penduduk di desa/kelurahan.

Kesemua peraturan tersebut di atas menjadi pegangan pada setiap kepala pemerintahan untuk dilaksanakan dan diperbunkan dengan seksama oleh seluruh perangkat kerja sehingga pada gilirannya dapat membuahkan hasil pendataan dengan teratur dan tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitannya dengan efektifitas registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo, dimana terlihat khususnya registrasi kelahiran dan kematian sudah menunjukkan hasil yang teratur dan tertib dikarenakan kesadaran dan antusias masyarakat

membantu aparat setempat. Namun untuk registrasi warga pendatang dan pindahan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan karena sulitnya dipantau dan diawasi.

TABEL XV

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELAHIRAN PENDUDUK DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agama	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Karena kelalaian	16	3	2	6	27	45
2.	Tidak mengikuti peraturan	16	2	2	5	25	41,7
3.	Karena persalinan dukun	2	-	-	6	8	13,3
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap kelahiran sesuai dengan tanggapan responden dengan memberikan penilaian karena kelalaian 27 orang (45%), penilaian kategori tidak mengikuti peraturan sebanyak 25 orang (41,7%), dan melalui persalinan dukun 8 orang (13,3%).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor yang berpengaruh di Kecamatan Tallo menunjukkan kategori penilaian karena kelalaian.

2. Kedisiplinan aparat pemerintah melakukan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo yaitu kedisiplinan dan ketegasan dari segenap aparat pemerintah mengembng tugas dan kewajibannya dengan baik, sebab dengan memperhatikan faktor ini para petugas senantiasa melakukan kegiatan dengan penuh kemampuan dan keuletan yang ada pada diri sendiri.

Dengan kedisiplinan dan ketegasan yang dimiliki oleh aparat melakukan registrasi kependudukan di wilayah kerjanya masing masing, nantinya dapat menghasilkan sistem dan efektifitas registrasi kependudukan teratur dan tertib sehingga dengan sendirinya memudahkan untuk mengetahui seluruh warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.

Terlepas dari uraian tersebut di atas, sekalipun dengan aparat pemerintah telah melakukan tugas-tugasnya dengan penuh kedisiplinan dan

ketegasan tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di setiap kelurahan untuk memberikan laporan yang sebenarnya. Disinilah perlunya aparat yang tegas mengetahui sikap, watak dan kepribadian warga masyarakat dalam melakukan tugasnya sehingga nantinya mendapatkan data dengan sebenar-benarnya untuk dimasukkan dalam laporan atau buku registerasi sebagai bahan laporan pada atasannya masing-masing.

TABEL XVI

TANGGAPAN APARAT PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN REGISTERASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agana	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Lancar	10	2	2	11	25	41,7
2.	Cukup lancar	22	2	1	10	23	38,3
3.	Kurang lancar	2	1	1	8	12	20
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1996

Data tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan aparat pemerintah dalam melakukan registerasi kependudukan di wilayah Kecamatan Tallo dengan klasifikasi lancar yaitu sebanyak 25 orang (41,7%)

dan penilaian cukup lancar 23 orang (38,3%) dan penilaian kurang lancar 12 orang (20%).

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kedisiplinan di Kecamatan Tallo menunjukkan klasifikasi penilaian tertinggi yaitu lancar dan kurang lancar.

3. Tersedianya fasilitas

Faktor terakhir turut berpengaruh dalam efektifitas registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo yaitu tersedianya fasilitas yang ada pada setiap saat dapat digunakan oleh petugas untuk melakukan pendataan ke rumah-rumah.

TABEL XVII

FASILITAS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENJALANKAN
REGISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KECAMATAN TALLO

No.	Klasifikasi Penilaian	Pegawai Kec./Kel.	Masyarakat			Frekuensi (F)	%
			T. Agama	T. Pemuda	Masy. Biasa		
1.	Sangat lengkap	16	1	1	10	28	46,7
2.	Lengkap	16	1	1	6	24	40
3.	Kurang lengkap	2	3	2	1	8	13,3
	Jumlah	34	5	4	17	60	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian 1998

Data tersebut menunjukkan fasilitas yang digunakan untuk menjalankan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo berdasarkan klasifikasi penilaian yakni sebanyak 28 orang (46,7 %) mengatakan sangat lengkap, penilaian lengkap 24 orang (40%) dan yang mengatakan kurang lengkap 8 orang (13,3%).

Dengan demikian data tersebut yang digunakan adalah penilaian mampu, di mana fasilitas yang digunakan dapat memberikan hasil yang memungkinkan pada setiap aparat yang melakukan penregistrasian penduduk di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan tersedianya fasilitas yang dimaksudkan di atas, maka tentunya para petugas dapat memperoleh data keterangan dan informasi dari warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan efektifitas registrasi kependudukan di kecamatan tersebut dengan tersedianya fasilitas kendaraan yang tersedia dengan jumlah sepeda motor hanya 1 buah, namun untuk penyediaan buku registrasi pada setiap kelurahan cukup banyak.

Apabila kita melihat lebih jauh para petugas diberikan tanggung jawab dalam melakukan registrasi kependudukan untuk warga masyarakat yang ada

di kecamatan tersebut dengan penyediaan kendaraan terlihat belum mencukupi.

Registerasi pendatang/pindahan terlihat belum terdata oleh petugas, hal ini dikarenakan fasilitas kendaraan yang setiap waktu disediakan untuk melakukan pemantauan ke seluruh daerah, sehingga warga pendatang pindah terkadang tak diketahui keberadaannya di kecamatan tersebut dan langsung menyelinap begitu saja bergabung dengan penduduk lama ataupun pindah begitu saja tanpa melaporkan diri pada petugas setempat.



BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo pada hakekatnya cukup lancar terutama dalam hal registrasi kelahiran dan kematian, sedang registrasi migrasi masuk dan keluar belum berjalan lancar.

Dalam mendaftarkan penduduk di Kecamatan Tallo dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan melihat data perubahan penduduk dari tahun ke tahun meningkat.

2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo di mana terlihat registrasi kelahiran menunjukkan penilaian dengan kategori sedang, registrasi kematian menunjukkan penilaian kategori tinggi, sedang registrasi migrasi pendatang dan pindahan menunjukkan penilaian dengan kategori rendah.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh guna efektifitas pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan

Tallo yaitu: sumber daya manusia tentang pengetahuan registrasi kependudukan terbatas, kedisiplinan aparat pemerintah yang sesuai dengan pencahangan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) oleh Presiden Soeharto serta faktor finance dan fasilitas atau sarana dalam melakukan registrasi kependudukan. Kesemuanya itu dapat membantu terwujudnya kelancaran tugas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk sistem registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo dilihat dari sudut registrasi pendatang dan pindahan, belum begitu lancar. Maka dihinbau kepada seluruh aparat khususnya yang menangani pencatatan kependudukan agar lebih memperhatikan dan bila perlu diberi ketegasan-ketegasan yang telah diputuskan oleh kepala wilayah setempat agar masyarakat sadar dalam arti kependudukan.
2. Untuk tingkat kesadaran masyarakat terhadap efektifitas registrasi kependudukan di Kecamatan

Tallo yang ditinjau ketika ada pendatang baru (New Comers) memasuki wilayah suatu daerah tidak melaporkannya kepada aparat yang berwenang, hal ini menunjukkan kategori rendah. Dan ini pula merupakan hasil relatif sehingga sudut pandang masyarakat tidak semuanya sama yang serba kompleks dan majemuk. Maka ketika kita melihat fakta-fakta yang ada diingatkan kepada aparat pemerintah agar lebih jeli memantau tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencatatan kependudukan.

3. Untuk faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo:

- Sumber daya manusia tentang pemahaman registrasi kependudukan di Kecamatan Tallo khususnya pengetahuan tentang kelahiran penduduk dengan peraturan yang berlaku. Dengan banyaknya penduduk yang melahirkan melalui persalinan dukum dapat menghambat registrasi kependudukan dikarenakan tidak terdaftar/melaporkan diri kepada pihak yang bersangkutan, akibatnya aparat pemerintah kekurangan data yang diinginkan.
- Kedisiplinan aparat pemerintah melakukan registrasi kependudukan, di mana pencatatan penduduk dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah setempat.

- Adapun fasilitas dan sarana yang cukup menunjang jalannya pencatatan penduduk di mana buku-buku kependudukan diedarkan kepada masing-masing petugas, sehingga dapat terisi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- Hanya dengan fasilitas kendaraan bermotor yang sering menghambat jalannya penregisterasian penduduk, di mana terlihat ada suatu daerah di Kecamatan Tallo sulit didatangi dengan fasilitas tersebut tetapi dapat dijangkau melalui kendaraan air yaitu perahu yang mana letak daerah tersebut adalah Kelurahan Langkang.

BUSUWA



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atmosudirjo Prajudi, 1973. *Batasan Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Stensil.
- Barclay W. George, 1970. *Teknik Analisa Kependudukan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Daljoeni, 1986. *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*, Bandung: Alumni.
- Irmansyah R Mamat, 1987. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Bandung: Armico.
- Koentjoroningrat, 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Prawiro H. Ruslan, 1983. *Kependudukan Teori dan Fakta*, Bandung: Alumni.
- Rusli Said, 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta: LP3ES.
- S.P. Hasibuan Malayu, *Manajemen Dasar, Penelitian dan Masalah*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Siggiang SP, 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, Cetakan VIII.
- Sihombing Bonn Frans, 1990. *Himpunan Peraturan Lengkap tentang Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 1993. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Tjokroamidjojo Soediono, 1990. *Ilmu Kependudukan*, Jakarta: Airlangga.
- Widjaya. AW, 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Tahun 1970*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirosuhardjo Kartono, 1981. *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

B. Dokumen-dokumen

GBHN RI, 1993-1998. Tap MPR Nomor II/MPR/1993, tentang *GBHN 1993-1998*, Surabaya: Bina Pustaka Tama.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974. tentang *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1974, tentang *Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 1980, tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan*.

Data Demografi Kecamatan Tallo, Tahun 1995.

